

# RENCANA KINERJA TAHUNAN



**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Mengacu pada Pasal 11 Ayat (3), Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 126 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (RENJA) secara tahunan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Memperhatikan hal tersebut maka dalam rangka memelihara kesinambungan perencanaan pembangunan, Renja Bappeda Tahun 2022 disusun dengan mencermati hasil capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan. Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target dari indikator dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.

Lebih lanjut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam RKT Bappeda Tahun 2022 akan menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda pada APBD T.A. 2022.

Akhir kata, kami berharap semoga RKT ini bermanfaat dan memberi kontribusi dalam pencapaian Visi - Misi pembangunan di Provinsi Lampung.

**KEPALA BAPPEDA,**

**Ir. MULYADI IRSAN, M.T.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah disusun Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh OPD baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 32.731.065.182,-. Untuk Belanja Urusan Penunjang, Bappeda melaksanakan 3 Program 15 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang terbagi kedalam 2 Sasaran Utama dan 1 Sasaran Pendukung. Dari program dan kegiatan tersebut Bappeda Provinsi Lampung berupaya meningkatkan kualitas perencanaan guna mendukung pelaksanaan good governance atau pemerintahan yang baik dan mewujudkan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu "Rakyat Lampung Berjaya"

**Bandar Lampung, Januari 2022**



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel dan Gambar</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.4.1 Sumber Daya Aparatur .....	4
1.4.2 Struktur Organisasi .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. Renstra Bappeda 2019-2024</b> .....	<b>9</b>
2.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung .....	9
2.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Renja Bappeda Tahun 2021 .....	13
2.2.1 Capaian Kinerja Bappeda 2021 .....	14
2.2.2 Akuntabilitas Keuangan & Realisasi .....	19
<b>BAB III. Rencana Kinerja Tahunan 2022</b> .....	<b>28</b>
3.1 Rencana Kinerja Tahunan 2022 .....	28
3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022 .....	29
<b>BAB IV. Penutup</b> .....	<b>50</b>



# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	<b>5</b>
<b>Tabel 1.2</b>	Jumlah Pejabat di Lingkup Bappeda Tahun 2021 .....	<b>6</b>
<b>Tabel 2.1</b>	Tujuan dan Indikator Kinerja.....	<b>13</b>
<b>Tabel 2.2</b>	Capaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2021 .....	<b>15</b>
<b>Tabel 2.3</b>	Pagu dan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2021 .....	<b>20</b>
<b>Tabel 3.1</b>	IKU Bappeda 2019-2024 .....	<b>28</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2022 .....	<b>35</b>

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung .....	<b>9</b>
<b>Gambar 2.1</b>	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 .....	<b>14</b>

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, oleh karenanya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan baik ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good governance). Perencanaan pembangunan daerah tersebut harus secara terencana dan tersusun dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung selaku instansi pemerintah di daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan mempunyai tanggung jawab dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan baik yang bersifat makro Provinsi maupun perencanaan dalam kelembagaan Bappeda itu sendiri. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki perencanaan jangka pendek (1 tahun) dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RKT adalah suatu rencana jangka pendek (1 tahun), yang berisikan perencanaan tahunan dengan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan langsung sebagai bentuk operasional dari pencapaian sasaran dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2019-2024

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pentingnya RKT tersebut disusun adalah untuk menjamin konsistensi dan keterukuran pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagai institusi Pemerintah Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.



### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah untuk menjaga konsistensi, keterukuran dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Bappeda Provinsi Lampung dalam menyusun rencana anggaran SKPD. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran dan tujuan.

RKT disusun dan ditampilkan dalam suatu tabel RKT yang menginformasikan tentang sasaran dan indikator dari masing-masing sub kegiatan yang ingin dicapai (target) dalam 1 (satu) tahun anggaran 2022. Untuk pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan. Sub Kegiatan yang akan dilakukan secara rinci dijelaskan berdasarkan indikator kegiatan (yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) dan masing-masing indikator memiliki target yang akan dicapai.

### **1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan administrasi;
6. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
7. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

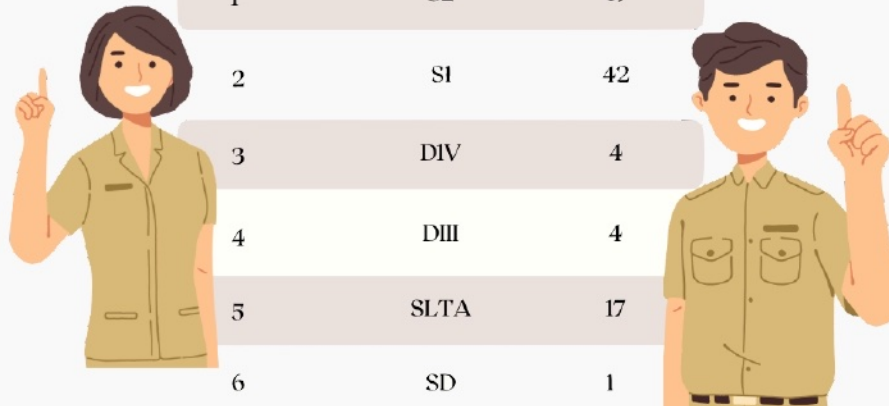
#### **1.4.1. Sumber Daya Aparatur**

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari 25 Jabatan Struktural, yaitu :

- a. Satu orang Kepala Badan, eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPT, eselon III.b;
- e. Lima orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a; dan
- f. Tiga Belas orang Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator).

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 1.1 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	47
2	SI	42
3	DIV	4
4	DIII	4
5	SLTA	17
6	SD	1
<b>Total :</b>		<b>115</b>

Berdasarkan Data Kepegawaian pada bulan Januari tahun 2022, Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari komposisi 115 ASN dilingkungan Bappeda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian Golongan III berjumlah 79 orang atau persentase 68,7% dengan rincian Golongan III.d berjumlah 24 orang, Golongan III.c sebanyak 25 orang, Golongan III. b sebanyak 24 orang, dan Golongan III. A sebanyak 6 orang. Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau persentase 21,74 % dengan rincian Golongan IV.d berjumlah 1 orang, Golongan IV.b sebanyak 6 orang, dan Golongan IV.a sebanyak 18 orang. Untuk Golongan II berjumlah 10 orang atau persentase 8,7% dengan rincian Golongan II d berjumlah 3 orang, Golongan II c 3 orang, Golongan II b 4 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,87 % dengan rincian Golongan I d berjumlah 1 orang. ASN berdasarkan klasifikasi gender yang menduduki jabatan di Bappeda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :



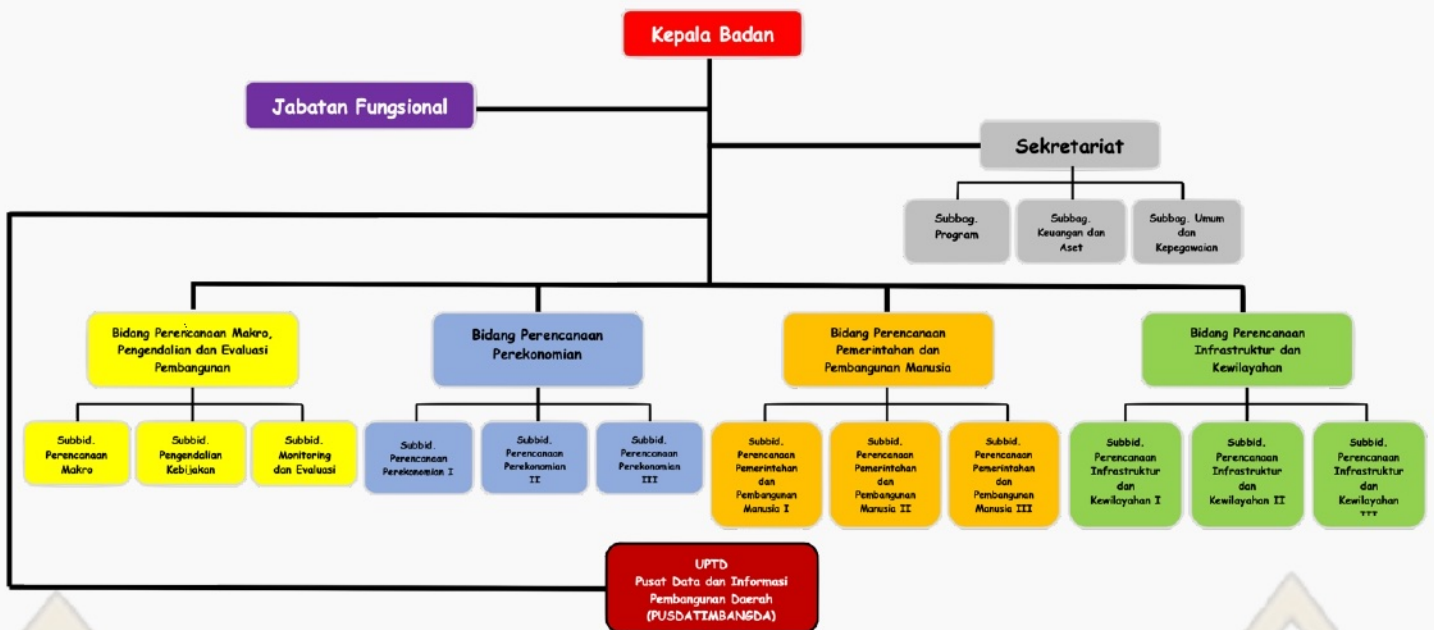
**Tabel 1.2 Jumlah Pejabat di Lingkup Bappeda Tahun 2022**

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1 Pejabat Struktural	7	5	12
2 Sub Koordinator Sub Substansi	8	5	13
3 Fungsional Perencana	10	14	24
4 Fungsional Umum/Pelaksana	38	28	66
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>52</b>	<b>115</b>

#### 1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 88 tahun 2016 mengalami perubahan dalam susunan struktur organisasi. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai gambar berikut.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung**



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Lampung tahun 2022 sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022.

#### **1.2 Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda tahun 2022.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022.

#### **1.4 Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Memuat tugas dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda Provinsi Lampung serta sumberdaya yang berada di Bappeda Provinsi Lampung antara lain : jumlah sumberdaya manusia (ASN).

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Evaluasi Renja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021 serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024**

### **2.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024**

Memuat Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2019-2024 serta keterkaitan RPJMD dengan Renstra Bappeda.

### **2.2 Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Renstra**

Berisi capaian indikator kinerja utama tahun sebelumnya beserta dengan realisasi dan persentasenya.

## **BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022**

Mengemukakan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Lampung dalam yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung tahun 2022

## **BAB IV. PENUTUP**

## **LAMPIRAN**



# BAB 2

## RENSTRA BAPPEDA 2019-2024

Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 juga salah satu bentuk komitmen kinerja yang akan dicapai Bappeda tahun 2019-2024. Renstra digunakan sebagai tolok ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung, serta sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Provinsi Lampung. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda serta besaran alokasi pagu anggaran

### 2.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Pada periode Renstra 2019 – 2024, mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Visi dan Misi OPD mengikuti Visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2015 – 20-19, kemudian

dijabarkan dalam Renstra OPD terkait Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program. Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024 yaitu :

## *“Rakyat Lampung Berjaya”*

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- b. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

- c. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.



Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Kehidupan Religius dan berbudaya;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi;
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pemerataan);
6. Peningkatan nilai tambah pertanian untuk penanggulangan kemiskinan; dan
7. Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus mempunyai indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024, adalah :

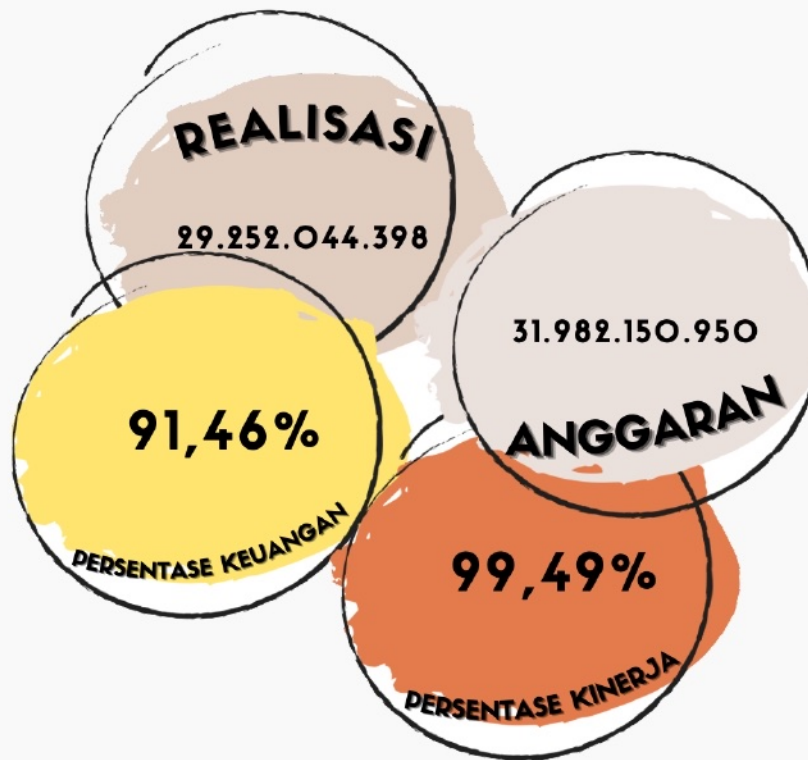
## 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	32%
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%

Tujuan tersebut selaras dengan misi II RJPMMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, dengan Tujuan **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, dan dijabarkan dengan Sasaran **Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi** dengan Indikator kinerja sasaran **Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi**.

## 2.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2021 melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021 dengan Anggaran sebesar Rp. 31.982.150.950,- yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.825.054.830,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.157.096.120,-. Pada Tahun 2021 total realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 29.252.044.398,- atau setara dengan 91,46 persen



**Gambar 2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021**

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 99,49% dengan 45 Sub Kegiatan yang mencapai 100% dan 4 Sub Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29 %.

### **2.2.1. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2021**

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran utama dan 1 (satu) indikator sasaran pendukung. Adapun capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2021**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I SASARAN UTAMA</b>					
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30	23,92	79,73
3.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	100	100
4.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100	100	100
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	85	45	53
<b>II SASARAN PENDUKUNG</b>					
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	BB	100

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sasaran utama dan sasaran pendukung dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



**1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah**

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se- wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

- 1) Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
- 2) Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;

**Indikator sasaran 1.a**

adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2021.

*Indikator Sasaran 1.a*

INDIKATOR KINERJA Penetapan RKPD Tepat Waktu			
Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Capaian 2020
Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%

**Indikator sasaran 1.b** adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja

*Indikator Sasaran 1.b*

INDIKATOR KINERJA Persentase Usulan Stakeholders dalam RKPD			
Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Capaian 2020
30%	23,92%	79,73%	98,16%

sebesar 30%. Adapun realisasinya adalah sebesar 23,92 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 79,73%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi

Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain :

- 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD.

2. **Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.**

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 53% (Data sementara per Januari 2022)

**Indikator sasaran 2.a** adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target



kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi

dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mendorong seluruh OPD sudah selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD.

**Indikator sasaran 2.b** adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target

*Indikator Sasaran 2.b*

INDIKATOR KINERJA			
Persentase Renja OPD selaras Indikator Sasaran RKPD			
Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Capaian 2020
100%	100%	100%	81,25%

kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dari 1.951 indikator sasaran Renja OPD telah selaras dengan RKPD.

**Indikator sasaran 2.c** adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85% atau sebanyak 17 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasi sampai dengan Bulan Januari tahun 2022 adalah sebesar 53% dengan total indikator yang telah mencapai target berjumlah 9 indikator, sedangkan untuk perhitungan indikator lainnya sampai saat ini masih berjalan sehingga analisis terhadap indikator ini masih belum dapat dilakukan

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 2 antrara lain :

- Belum selaras nya indikator Renstra OPD dengan 20 indikator pada Perubahan RPJMD 2019-2024;
- Dikarenakan Renstra OPD belum selaras dengan indikator RPJMD 2019-2024, maka hal tersebut berdampak pula dengan RKPD dan Renja OPD yang merupakan rencana tahunan nya;
- Target yang ingin dicapai pada 20 indikator kinerja pada Perubahan RPJMD 2019-2024 tidak tercapai dikarenakan karena dampak Pandemi Covid-19 sebagai bencana di bidang kesehatan masih berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keuangan daerah sehingga berdampak pula pada capaian target pembangunan daerah.

Untuk menyelesaikan hambatan diatas, maka dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:



- BAPPEDA dengan didampingi oleh OPD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sector bagi semua OPD dalam melakukan penyelerasan indikator Perubahan Renstra dan segera melakukan perbaikan dalam menentukan indikator Renstra yang bersifat “SMART”; dan
- Melakukan penyesuaian pada program/kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai dengan menyesuaikan keuangan Daerah.

### 3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta aset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada awal Tahun 2021.

#### 2.2.2. Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2021

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2021 melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021 dengan Anggaran sebesar Rp. 31.982.150.950,- yang terbagi dalam Sasaran





Utama sebesar Rp. 6.825.054.830,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.157.096.120,-. Pada Tahun 2021 total realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 29.252.044.398,- atau setara dengan 91,46%. Dari 49 Sub kegiatan, sebanyak 45 sub kegiatan yang mencapai 100% dan 4 Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29%.

Untuk 5 Sasaran Utama terdiri 3 program dan 6 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.825.054.830,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.730.138.900,- atau setara dengan 83,96% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 1 program 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 25.157.096.120,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.521.905.498,- atau setara dengan 93,50%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi setelah dampak Covid-19.

**Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021**

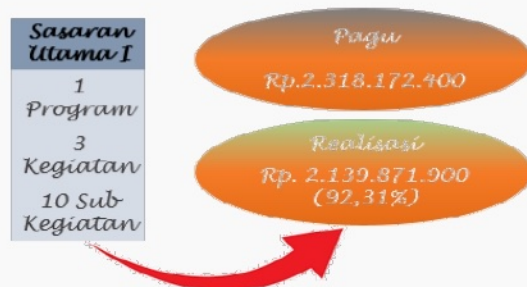
No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
<b>SASARAN UTAMA</b>								
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	2.318.172.400	2.139.871.900	92,31
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD.	30%	23,92%	79,73 %			
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100%	100%	100%	4.506.882.430	3.590.267.000	79,66
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renja	100%	100%	100%			

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
		nya selaras dengan indikator sasaran RKPD						
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	85	---	----			
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>								
1.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	BB	100	25.157.096.120	23.521.905.498	93,50
<b>TOTAL</b>						<b>31.982.150.950</b>	<b>29.252.044.398</b>	<b>91,46</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat pada Sasaran Utama tingkat realisasi anggaran tertinggi ada pada Sasaran Pendukung yaitu 93,50%, Sedangkan tingkat realisasi anggaran terendah ada pada Sasaran Utama ke-2 yaitu 79,66%. Untuk lebih rinci, berikut ditampilkan anggaran per sasaran nya.

### 1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Pagu anggaran yang direncanakan untuk Sasaran Utama 1 adalah sebesar Rp. 2.318.172.400,-. Adapun realisasi hingga Bulan Desember adalah sebesar Rp. 2.139.871.900,-. Atau setara dengan 92,31%. Realisasi kinerja anggaran dari Sasaran Utama I terbagi dalam 1 satu program 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan.



Adapun uraian realisasi kinerja pada Sasaran Utama I adalah sebagai berikut:

**I) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

⇒ **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

1. Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terkait perencanaan dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD dengan tingkat capaian 100%; dan
3. Jumlah dokumen RKPD Murni dan Perubahan dengan tingkat capaian 100%;

⇒ **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Jumlah Keterisian E-Database n-1 dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%; dan
3. Jumlah pembinaan Kabupaten/ Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%.

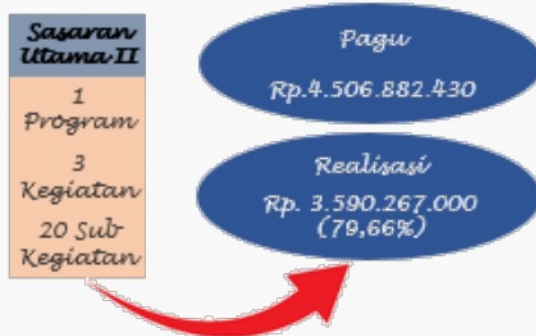
⇒ **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RPJMD, dan RKPD dengan tingkat capaian 100%; dan
3. Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota dengan tingkat capaian 100%.



**2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.**

Pagu awal yang direncanakan dalam untuk mencapai sasaran utama



2 adalah sebesar Rp. 4,506.882.430,- dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 3.590.267.000,- (79,66%). Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Utama 2 yang terdiri 1 Program yang terbagi menjadi 3 kegiatan dan 20

Subkegiatan. Realisasi 3 Kegiatan tersebut sebagai berikut :

**II) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

**⇒ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

1. Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%;



5. Jumlah dokumen perencanaan Strategis Daerah Penanganan Anak Putus Sekolah dan dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%; dan
6. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian 100%.

⇒ **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

1. Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang Perekonomian dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Perekonomian dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang Ekonomi Kreatif dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Sumber Daya Alam dengan tingkat capaian 100%; dan

8. Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD) di Bidang Ekonomi Kreatif dengan tingkat capaian 100%.

⇒ **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

1. Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP yang menjadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen kebijakan KLHS revisi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%;
5. Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan GRK dengan tingkat capaian 100%; dan
6. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%.

**3. Sasaran Pendukung : Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA**

Untuk Sasaran Pendukung, pagu anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp. 25.157.096.120,- dengan realisasi sampai dengan Bulan Desember sebesar Rp. 23.521.905.498,- (93,50%). Pagu anggaran yang disediakan adalah untuk mendukung pelaksanaan Program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Adapun realisasi kegiatannya sebagai berikut:

### **III) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

#### **⇒ Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Jumlah dokumen perencanaan (Revisi Renstra, Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan) dengan tingkat capaian 100%; dan
2. Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan) dengan tingkat capaian 100%.

#### **⇒ Kegiatan Administrasi Keuangan**

1. Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%; dan
2. Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD dengan tingkat capaian 100%.

#### **⇒ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan tingkat capaian 100%; dan
2. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi dengan tingkat capaian 97,5%

#### **⇒ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%;

6. Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan tingkat capaian 90,29%;
- ⇒ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100%.
- ⇒ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%;
  2. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%; dan
  3. Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor dengan tingkat capaian 100%.
- ⇒ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12%;
  2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 93,14%; dan
  3. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian 100%.



# BAB 3

## RENCANA KINERJA

### TAHUNAN 2022

#### 3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Sebagaimana Tujuan Renstra beserta Indikator kinerja Tujuan yang akan dicapai pada akhir periode Resntra yang telah dijelaskan di atas, kemudian dilakukan penjabaran Tujuan Renstra menjadi beberapa Sasaran dengan indikator dan target sasaran Renstra. Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

**Tabel 3.1 IKU BAPPEDA 2019-2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
			Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD;	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	90%

### 3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 4. Penyediaan Bahan/Material
  - 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan :**

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
  2. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
  3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
  3. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  4. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
  2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  3. Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota



**III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :**

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
  5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
  5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
  7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
  8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta alokasi pagu anggaran untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Rencana tersebut juga disertai dengan agenda pelaksanaan pencapaian target kinerjanya, sebagaimana Matrik RKT Tahun 2022 dibawah ini.

TABEL 3.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

TUJUAN	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)				PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (yang menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah	Waktu Penetapan RKP	Waktu	1 minggu setelah RKP ditetapkan	Meningkatnya kualitas dan kepatuhan jadwal dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	Terlaksananya Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	122.620.000	Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	
		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKP	%	30						Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	268.955.000	Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi	
											Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKP (Murni dan Perubahan)	Dokumen	2	502.310.000	Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi
						Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi pembangunan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	%	100	Terinputnya masukan data dan informasi serta keterisian data SIPD melalui Aplikasi SIPD (E-Database)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database n-1	Masukan %	375	120.260.500	UPTD PUSDATIN BANGDA
									Terbinanya sumber daya manusia Perangkat	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta	Orang & Dokumen	75 & 2	561.185.500	UPTD PUSDATIN BANGDA		



JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Daerah dalam pemanfaatan data dan informasi serta penyusunan dokumen kajian PNPB Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Kajian PNPB Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik				
										Terbinanya sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi Kabupaten/kota	Orang	60	189.238.000	UPTD PUSDATIN BANGDA
										Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	Buku Dokumen	1 1	410.563.000	UPTD PUSDATIN BANGDA
					Meningkatnya capaian kinerja OPD se- Provinsi Lampung dan keselarasan perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pembangunan daerah di OPD Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota	%	100	Tersedianya laporan Dekon/TP/DAK dan laporan monitoring	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan Dekon/TP/DAK dan laporan monitoring	Laporan	2	50.358.900	BIDANG PME
										Tersedianya buku laporan pelaksanaan program serta kegiatan APBD	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Jumlah buku laporan pelaksanaan program serta kegiatan APBD	Laporan	2	272.575.000	BIDANG PME

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR						SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
										yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPd tahun 2022	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPd Tahun 2022					
										Terfasilitasinya/ Evaluasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPd dan RKPd Perubahan Kab/ Kota	Dokumen	3	243.709.200	BIDANG PME	
	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	Tersedianya dokumen proceeding FGD di sektor pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	96.922.000	BIDANG P3M	
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPd;	%	100						Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan tersedianya dokumen	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan	Perangkat Daerah & Dokumen	10 & 1	220.000.000	BIDANG P3M	

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan		terkait Bidang Pemerintahan				
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	85						Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan tersedianya dokumen Laporan Capaian TPB/SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan tersedianya dokumen Laporan Capaian TPB/SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	Perangkat Daerah & Dokumen	10 & 1	214.180.000	BIDANG P3M
										Tersedianya Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	Koordinasi Penyusunan Dokumen Strategi Daerah Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022 Sumberdaya Manusia	Dokumen	1	299.980.000	BIDANG P3M
										Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan tersedianya dokumen Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang di Asistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah & Dokumen	6 & 1	200.000.000	BIDANG P3M
										Terlaksananya monitoring	Pelaksanaan Monitoring	Jumlah perangkat	Perangkat Daerah	6 &	94.688.200	BIDANG P3M

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan tersedianya dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pembangunan Manusia	daerah yang dievaluasi Renstra/ Rencana dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021	& Dokumen	1		
										Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	150.000.000	BIDANG P3M
										Tersedianya Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022	Laporan	2	305.651.800	BIDANG P3M



JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Perencanaan dengan RKPD dan RPJMD.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lingkup bidang Perencanaan dan SDA	%	100	Tersedianya Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan sektor unggulan terhadap pembangunan daerah dan Buku Peluang Investasi	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan sektor unggulan terhadap pembangunan daerah dan Buku Peluang Investasi	Dokumen	2	182.847.300	BIDANG PEREKONOMIAN
										Terlaksananya asistensi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, dokumen strategis kebijakan pembangunan perkeonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi renstra/renjan ya dan penyusunan dokumen analisis dan strategis kebijakan pembangunan perkeonomian Provinsi Lampung dan Dokumen Target Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung	Perangkat daerah & Dokumen	5 & 2	151.640.000	BIDANG PEREKONOMIAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan Dokumen Laporan Monev	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Dokumen Laporan Monev	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi renstra/renjanya dan penyusunan dokumen laporan monev serta buku statistic perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan)	Perangkat daerah & Dokumen	5 & 5	79.114.600	BIDANG PEREKONOMIAN
										Tersedianya Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan	Laporan	1	158.549.900	BIDANG PEREKONOMIAN
										Tersedianya Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	Laporan	1	116.555.800	BIDANG PEREKONOMIAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Tersedianya Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	41.879.000	BIDANG PEREKONOMIAN
										Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan tersedianya dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah & Dokumen	4 & 1	141.696.400	BIDANG PEREKONOMIAN
										Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan tersedianya dokumen Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah	Perangkat Daerah & Dokumen	4 & 2	83.022.000	BIDANG PEREKONOMIAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT)					PEJABAT ADMINISTRATOR						SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
											Periklanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB	dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB					
					Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD dan RPJMD.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	Tersedianya Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pengembangan Wilayah	Dokumen	1	366.391.900	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
										Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan tersedianya Dokumen capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Money dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah & Dokumen	4 & 1	13.396.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
										Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	26.256.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	



JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR						SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
										Tersedianya Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakaryaa n Provinsi Lampung	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakaryaa n Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakaryaa n Provinsi Lampung	Dokumen	1	357.892.100		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
										Terlaksananya asistensi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan Daerah dan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah & Dokumen	5 & 1	103.792.000		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
										Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan Dokumen capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Money dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah & Dokumen	5 & 1	36.212.000		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
										Terlaksananya asistensi perangkat daerah dalam menyusun	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/	Perangkat Daerah & Dokumen	4 & 1	500.000.000		BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										dokumen perencanaan daerah dan tersedianya Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Renja nya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung				
										Tersedianya Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	Laporan	2	270.166.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	Nilai	BB	Meningkatnya kualitas dan kepatuhan jadwal dokumen perencanaan dan evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi perangkat	%	100	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Murni (n+1), Renja	Dokumen	11	207.287.000	SEKRETARIAT

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					perangkat daerah		daerah yang tepat waktu					Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja RB)					
										Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2022	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKJ, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja RB)	Dokumen	7	137.911.000	SEKRETARIAT	
					Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	115	15.494.945.400	SEKRETARIAT	
										Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	2	102.424.000	SEKRETARIAT	
					Meningkatnya kualitas dan kepatuhan jadwal dokumen barang dan aset perangkat daerah.	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	%	100	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	3	55.000.000	SEKRETARIAT	

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Meningkatnya kompetensi ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mengikuti Diklat/ Bimtek	%	100	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	275	139.750.000	SEKRETARIAT
										Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi bimtek dan sosialisasi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bimtek dan sosialisasi	Orang	50	26.445.040	SEKRETARIAT
					Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	%	100	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	1.574.151.600	SEKRETARIAT
										Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	10.000.000	SEKRETARIAT
										Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	16.580.000	SEKRETARIAT
										Tersedianya bahan/ material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	12	19.953.950	SEKRETARIAT
										Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	79.200.000	SEKRETARIAT
										Tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	4.552.725.692	SEKRETARIAT



JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Meningkatnya pemenuhan sarana perkantoran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana perkantoran	%	100	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	116	880.494.000	SEKRETARIAT
					Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	%	100	Tersedianya Dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	424.000.000	SEKRETARIAT
										Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	27.790.000	SEKRETARIAT
										Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.209.573.800	SEKRETARIAT
					Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	%	100	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	14	341.570.000	SEKRETARIAT

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)					PEJABAT ADMINISTRATOR					SUB KOORDINATOR					PAGU ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	SASARAN SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
											Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	270	21.778.600	SEKRETARIAT
											Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Musholla + Ruang Laktasi dan Kamar Mandi Lt.1 dan II	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Musholla + Ruang Laktasi dan Kamar Mandi Lt.1 dan II	Unit	2	456.337.000	SEKRETARIAT

# PENUTUP

Mengacu pada Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024, pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang tercermin pada Indikator Kinerja outcome dan output beserta target-nya secara konsisten diarahkan pada pencapaian tujuan untuk “Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas” yang dijabarkan pada pencapaian 2 (dua) sasaran utama, yaitu : 1) meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, dan 2) meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan daerah di Provinsi Lampung, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022 dirancang untuk melaksanakan 3 (tiga) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan pembangunan, dengan dukungan alokasi APBD sebesar Rp. 32.731.065.182,-

Ke depan, dengan telah disusunnya RKT Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022, maka RKT ini akan menjadi instrument pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan bahan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung.